

BAB. IV SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengembangkan kebijakan jalur hijau jalan di sepanjang jalan raya Kota Bandar Lampung seperti Jalan Teuku Umar dan Jalan Zainal Abidin Pagar Alam. Dalam persepsi pemerintah pemilihan tanaman angka sebagai pembatas karena masa perawatan yang efisiensi dan efektif, serta memberi manfaat ekonomi langsung pada masyarakat namun, aspek pokok suatu tanaman jalan seperti perkembangan morfologi, fungsi ekologis, fungsi estetika dan faktor keselamatan belum menjadi pilihan pokok dalam pandangan kebijakan pemerintah.

Persyaratan suatu RTH kota seperti jalur hijau jalan yaitu pencapaian fungsi RTH yang berupa fungsi ekologis, estetika, sosial budaya, dan ekonomi. Hal pokok dari fungsi ekologis pada area jalan berkaitan dengan pengurangan polusi udara dan penciptaan iklim mikro di area jalan oleh sebab itu, pada konteks tanaman berjenis pohon diperlukan suatu kebijakan pemilihan alternatif pohon pengurang polusi, dan kebijakan pemilihan alternatif pohon penyanggah iklim mikroa pada area jalur hijau jalan. Kebijakan alternatif pohon tersebut bersifat penting dan pokok sebagai penjelasan operasional

kebijakan perancangan pola struktur kota sebelumnya maka, kebijakannya dapat berupa Peraturan Walikota Bandar Lampung Tentang Pedoman Penentuan dan Pemilihan Jenis Tanaman Jalur Hijau Jalan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pembentukan kesan estetika suatu tanaman sebagai lanskap arsitektur jalan belum tercipta pada area jalan Kota Bandar Lampung bahkan, menimbulkan rasa khawatir faktor keselamatan pada masyarakat mengenai tanaman nangka di median jalan. Berdasarkan fungsi estetika maka, diperlukan kebijakan pengaturan pemilihan tanaman dengan memerhatikan jumlah komposisi jenis tanaman, variasi warna, dan perhatian aspek keselamatan. Kebijakan tersebut bersifat penting dengan memerhatikan efek kenyamanan, keindahan dan faktor keselamatan pengguna jalan dan masyarakat sekitar maka kebijakan dapat berupa penjelasan operasional kebijakan perancangan pola struktur kota sebelumnya melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Tentang Penataan dan Pengaturan Tanaman Dalam Sistem Lanskap Jalan Kota

Berdasarkan fungsi RTH ada dua fungsi tambahan yang memerlukan perhatian dalam pengembang jalur hijau jalan Kota Bandar Lampung yaitu sosial budaya dan ekonomi. Berdasarkan penelitian fungsi sosial budaya belum tercipta melalui pohon nangka dalam menarik daya tarik kepedulian masyarakat akan lingkungan dan tanaman oleh sebab itu, diperlukan suatu rumusan kebijakan pemilihan alternatif tanaman dalam bentuk eksperisi budaya lokal sebagai faktor pendorong dan daya tarik penciptaan hubungan komunikasi dan interaksi

masyarakat dalam lingkungan alam disekitarnya. Bentuk kebijakan dalam mendukung fungsi sosial budaya dapat berupa Surat Edaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung Tentang Jenis Tanaman Budaya Lokal Masyarakat.

Berdasarkan fungsi ekonomi penempatan tanaman dengan jenis tanaman nangka yang berbuah besar yang memiliki nilai ekonomi yang bersifat langsung dan bermanfaat bagi masyarakat oleh sebab itu, diperlukan pengaturan untuk mengatur dan memperbaiki fungsi ekonomi pada RTH jalur hijau jalan. Bentuk rumusan kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan alternatif tanaman yang memiliki nilai guna ekonomi bagi masyarakat maka bentuk kebijakannya dapat berupa Surat Edaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung Tentang Jenis Tanaman Bermanfaat Bagi Masyarakat

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang dari penelitian mengenai Analisis Kebijakan Penanaman Pohon Nangka Sebagai Pohon Peneduh Jalan di Kota Bandar Lampung, saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai pelaksana pengembang jalur hijau jalan sebaiknya memberikan penekanan pada fungsi pengurang polusi dan penyanggah iklim mikro di daerah area jalan. Perhatian aspek tersebut sebagai pencapaian tujuan kesehatan lingkungan dalam rancangan RTH Kota;

2. Pemerintah dalam melakukan penempatan tanaman jalan pada area jalur hijau harus memberikan perhatian perkembangan morfologi, faktor keselamatan, dan komposisi jenis tanaman sebagai pembentuk nilai keindahan, keserasian dan keserasian arsitektur lanskap jalan;
3. Pemerintah sebagai aktor kebijakan lingkungan dapat menggunakan perhatian nilai ekspresi budaya lokal dan nilai guna ekonomi pada masyarakat dalam penentuan jenis tanaman jalan. Penempatan tanaman dengan nilai ekspresi budaya lokal dan nilai guna ekonomi dapat menjadi solusi pembentuk komunikasi atau interaksi antara manusia dan lingkungan alam